



# **GUBERNUR RIAU**

---

## **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 148 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

**PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah perlu pengaturan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A ;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya;
7. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri yang diangkat dengan Keputusan Gubernur;
8. Perjalanan dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula;

9. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/domisili tempat tinggal;
10. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri;
13. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
16. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
19. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan kedinasan;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut;

23. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang melaksanakan perjalanan dinas.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang dibebankan pada APBD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dan Calon PNS.

## **BAB III**

### **PRINSIP PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - b. efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
  - c. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD;
  - d. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas ;
  - e. wajar, yaitu sebagaimana adanya tanpa ada tambahan apapun.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
  - b. Tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
  - c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
  - d. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- (3) Dalam rangka memenuhi pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPA melaksanakan monitoring pelaksanaan Perjalanan dinas dan penerbitan Surat Peritan Tugas di lingkup bidang/unit kerjanya dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IA;

**BAB IV**  
**PERJALANAN DINAS**

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Perjalanan dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
  - b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau ;
  - c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/ Unit Kerja;
  - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
  - a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
  - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
  - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait yang dilaksanakan oleh PNS secara selektif maksimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Struktural didampingi oleh 1 (satu) orang PNS Non Struktural dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 2 (dua) hari;
- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan PNS dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari;
- (6) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi dan kunjungan kerja atau studi banding ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait yang dilaksanakan oleh anggota DPRD dilakukan secara selektif, dan dapat didampingi oleh PNS/ Staf Ahli dengan

- mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dibatasi maksimal 3 (tiga) hari;
- (7) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilo meter dari batas kota dibatasi maksimal 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang;
  - (8) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
  - (9) PNS Golongan I, PTT/Tenaga Kontrak dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus atau dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.
  - (10) Individu dan masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Inspektorat, Bappeda, Sekretariat Dewan dan Lembaga Teknis Daerah ditandatangani oleh:
  - a. Untuk SPT.
    1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
    2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
    3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
    4. Kepala SKPD, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.
    5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIb, Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Eselon dan PTT, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
    6. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.
  - b. Untuk SPPD.
    1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
    2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala SKPD.
  5. Jabatan Administrator/Esselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Eselon dan PTT, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
  6. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- (3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangi oleh:
- a. Untuk SPT.
    1. Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    2. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Eselon dan PTT, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya atas nama Sekretaris Daerah.
  - b. Untuk SPPD.
    1. Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    2. Kepala Bagian, Kepala SubBagian, PNS Non Eselon dan PTT, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas;
  - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - e. maksud pelaksanaan tugas.

#### Pasal 6

Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Naskah Dinas.

### **BAB V**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### Pasal 7

Biaya Perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD penerbit SPPD.

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya taksi; dan
  - f. sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana di atur dalam lampiran II;
- (3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah  
Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah  
Biaya tiket.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
  - b. ditempat menginap lainnya.
- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.
- (6) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran Riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (9) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:
- a. Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.

- (10) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- (11) Dalam hal perjalanan dinas lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala SKPD;
- (12) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota di Jakarta pada SKPD Badan Penghubung Provinsi Riau, merupakan pengganti uang transport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (13) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Biaya Perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat menggunakan kwitansi biro perjalanan/voucher;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD dengan ketentuan :
  - a. Untuk hari berangkat dan hari pulang uang harian dibayarkan sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
  - b. Untuk hari pelaksanaan kegiatan uang harian dibayarkan sebesar 50% dari uang harian yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

- (4) Dalam hal biaya hotel penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

#### Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
- Biaya perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur;
  - Biaya perjalanan dinas Tingkat A untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;
  - Biaya perjalanan dinas Tingkat B untuk Eselon II;
  - Biaya perjalanan dinas Tingkat C untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
- (2) Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
- Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III
  - Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV
- (3) Perjalanan dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
- Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III
  - Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV
- (3) Perjalanan dinas untuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
- Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama)
  - Ketua Bidang disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III
  - Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV
- (4) Perjalanan dinas untuk PTT/Individu/Masyarakat diatur sebagai berikut:
- Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
  - Golongan I bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan PA/KPA dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD yang bersangkutan.
  - (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi, yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

## **BAB VI**

### **PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

#### **Pasal 13**

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 14**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang diberikan kepada Pelaksana SPPD dibayarkan paling cepat 2 (dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dari UPTD ke ibukota provinsi (Pekanbaru) dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai standar uang harian Kabupaten/Kota tempat kedudukan UPTD.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam kota Pekanbaru untuk menghadiri acara rapat, sosialisasi, diklat, seminar dan sejenisnya yang pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) jam dapat diberikan uang transportasi Pekanbaru, dengan bukti kehadiran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.E

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotocopy Surat Perintah Tugas;
  - b. fotocopy SPPD (Lembar I);
  - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya yang tidak dapat dikembalikan/refund.

## **BAB VIII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 5 ayat (2);
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II);
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - e. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang disahkan pihak hotel terkait, dan;
  - f. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

#### **Pasal 18**

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada lampiran I.H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban Uang Persediaan.

#### **Pasal 19**

Besaran rincian satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN INTERNAL**

Pasal 20

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya di Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt.GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**M.YAFIZ**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 148







LAMPIRAN IB : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

**A. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPT Nomor :

Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Terbilang			

.....,tanggal,bulan,tahun

Telah dibayar sejumlah  
Rp.....

telah diterima sejumlah  
Rp.....

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

yang menerima

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : .....

Yang telah dibayar semula : .....

Sisa kurang/lebih : .....

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP.

**Plt.GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.ARSYADJULIANDI RACHMAN**

LAMPIRAN IC : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Transportasi			Lainnya
			Udara	Darat	Laut	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur/Wakil Gubernur		Bisnis	Spesial/Super Eksekutif	VIP/ Kelas I A	Sesuai Kenyataan
2	Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Esselon I	A	Bisnis	Super Eksekutif	Kelas I B	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon II	B	Ekonomi	Super Eksekutif	Kelas II A	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat Eselon III/Pejabat Esselon IV, Staf Golongan IV/III/II/I Pejabat lainnya yang setara serta Pegawai Tidak Tetap	C	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II A	Sesuai Kenyataan

**Pit.GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.ARSYADJULIANDI RACHMAN**

LAMPIRAN ID : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR :  
TANGGAL :

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : ..... (Pemberi Tugas)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor ..... tanggal ....., atas nama ..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:  
Adanya perpanjangan tugas ..... hari disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana SPPD.

....., tanggal, bulan, tahun  
Pemberi Tugas,

.....

---

**Plt.GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.ARSYADJULIANDI RACHMAN**



**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**  
NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
Unit Organisasi : ..... (4)  
Lembaga : ..... (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (7)  
Jabatan : ..... (8)  
Unit Organisasi : ..... (9)  
Lembaga : ..... (10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..... (12)  
Yang Membuat Pernyataan

..... (13)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan:

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD
- (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan  
(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas.
- 

**Plt.GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN  
PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
Unit Organisasi : ..... (4)  
Lembaga : ..... (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ..... tanggal ..... dan SPT Nomor ..... tanggal .....atas nama:

Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (7)  
Jabatan : ..... (8)  
Unit Organisasi : ..... (9)  
Lembaga : ..... (10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... tanggal .....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa .....(11).... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(12)..... sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor :.....tanggal.....SKPD.....(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas daerah.

..... (14)  
Yang Membuat Pernyataan

..... (15)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan:

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

- (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
  - (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
  - (8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
  - (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
  - (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
  - (11) Diisi transport yang digunakan
  - (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
  - (13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
  - (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan,
  - (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- 

**Pt. GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor ..... tanggal ....., dengan ini Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Biaya transport pejabat/pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	URAIAN	JUMLAH
	<b>Jumlah</b>	

- b. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:  
 .....,tanggal,bulan,tahun  
 Pengguna Anggaran/  
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana SPPD,

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

**Plt.GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	Provinsi	Gubernur/ Wakil Gubernur	PNS/ASN						
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C			Non Eselon Golongan II/I	
			Eselon I/ Pimpinan DPRD/Angg ota DPRD	Esselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon Golongan IV		Non Eselon Golongan III
1	Aceh	1,410,000	1,130,000	950,000	600,000	500,000	460,000	410,000	410,000
2	Sumatera Utara	1,300,000	1,040,000	880,000	560,000	460,000	430,000	380,000	380,000
3	Sumatera Barat	1,340,000	1,070,000	900,000	570,000	470,000	440,000	390,000	390,000
5	Riau	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
6	Kepulauan Riau	1,450,000	1,160,000	980,000	620,000	510,000	480,000	420,000	420,000
7	Jambi	1,340,000	1,070,000	900,000	570,000	470,000	440,000	390,000	390,000
8	Sumatera Selatan	1,470,000	1,170,000	990,000	630,000	520,000	480,000	430,000	430,000
9	Bangka Belitung	1,560,000	1,250,000	1,050,000	670,000	550,000	510,000	460,000	460,000
10	Bengkulu	1,340,000	1,070,000	900,000	570,000	470,000	440,000	390,000	390,000
11	Lampung	1,180,000	940,000	800,000	500,000	410,000	390,000	340,000	340,000
12	Banten	1,410,000	1,130,000	950,000	600,000	500,000	460,000	410,000	410,000
13	Bali	1,630,000	1,310,000	1,100,000	700,000	580,000	530,000	480,000	480,000
14	D.K.I. Jakarta	2,000,000	1,600,000	1,350,000	850,000	700,000	650,000	580,000	580,000
15	D.I. Yogyakarta	1,560,000	1,250,000	1,050,000	670,000	550,000	510,000	460,000	460,000
16	Jawa Tengah	1,340,000	1,070,000	900,000	570,000	470,000	440,000	390,000	390,000
17	Jawa Barat	1,720,000	1,370,000	1,160,000	730,000	600,000	560,000	500,000	500,000
18	Jawa Timur	2,010,000	1,610,000	1,360,000	860,000	710,000	660,000	590,000	590,000
19	Nusa Tenggara Barat	1,560,000	1,250,000	1,050,000	670,000	550,000	510,000	460,000	460,000
20	Nusa Tenggara Timur	1,710,000	1,370,000	1,150,000	730,000	600,000	560,000	500,000	500,000
21	Kalimantan Barat	1,410,000	1,130,000	950,000	600,000	500,000	460,000	410,000	410,000
22	Kalimantan Selatan	1,410,000	1,130,000	950,000	600,000	500,000	460,000	410,000	410,000
23	Kalimantan Tengah	1,410,000	1,130,000	950,000	600,000	500,000	460,000	410,000	410,000

24	Kalimantan Timur	1,630,000	1,310,000	1,100,000	700,000	580,000	530,000	480,000	480,000
25	Kalimantan Utara	1,510,000	1,210,000	1,020,000	640,000	530,000	490,000	440,000	440,000
26	Gorontalo	1,410,000	1,130,000	950,000	600,000	500,000	460,000	410,000	410,000
27	Sulawesi Utara	1,600,000	1,280,000	1,080,000	680,000	560,000	520,000	470,000	470,000
28	Sulawesi Tenggara	1,340,000	1,070,000	900,000	570,000	470,000	440,000	390,000	390,000
29	Sulawesi Tengah	1,300,000	1,040,000	880,000	560,000	460,000	430,000	380,000	380,000
30	Sulawesi Selatan	1,520,000	1,220,000	1,030,000	650,000	540,000	500,000	450,000	450,000
31	Sulawesi Barat	1,410,000	1,130,000	950,000	600,000	500,000	460,000	410,000	410,000
32	Maluku	1,340,000	1,070,000	900,000	570,000	470,000	440,000	390,000	390,000
33	Maluku Utara	1,490,000	1,190,000	1,000,000	630,000	520,000	490,000	430,000	430,000
34	Papua	2,080,000	1,660,000	1,400,000	890,000	730,000	680,000	610,000	610,000
35	Papua Barat	1,710,000	1,370,000	1,150,000	730,000	600,000	560,000	500,000	500,000

## 2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH

NO	Provinsi	Gubernur/ Wakil Gubernur	PNS/ASN						
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C			Non Eselon Golongan II/I	
			Eselon I/ Pimpinan DPRD/Angg ota DPRD	Esselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon Golongan IV		Non Eselon Golongan III
1	Dumai	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
2	Rokan Hulu	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
3	Indragiri Hulu	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
4	Indragiri Hilir	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
5	Kampar	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
6	Bengkalis	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
7	Siak	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
8	Pelalawan	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
9	Kuantan Singingi	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
10	Kepulaun Meranti	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000
11	Rokan Hilir	1,400,000	1,120,000	940,000	600,000	490,000	460,000	410,000	410,000

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH

NO	Provinsi	Gubernur/ Wakil Gubernur	PNS/ASN						
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C				
			Eselon I/ Pimpinan DPRD/Angg ota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon Golongan IV	Non Eselon Golongan III	Non Eselon Golongan II/I
1	Aceh	4,420,000	1,300,000	930,000	850,000	850,000	450,000	450,000	
2	Sumatera Utara	4,960,000	1,214,000	783,000	703,000	703,000	510,000	510,000	
3	Kepulauan Riau	4,275,000	1,300,000	730,000	650,000	650,000	510,000	510,000	
4	Jambi	4,000,000	1,200,000	820,000	740,000	740,000	400,000	400,000	
5	Riau	3,820,000	1,200,000	766,000	686,000	686,000	450,000	450,000	
6	Sumatera Barat	4,240,000	1,160,000	970,000	890,000	890,000	520,000	520,000	
7	Sumatera Selatan	4,680,000	1,250,000	710,000	630,000	630,000	560,000	560,000	
8	Lampung	3,960,000	1,300,000	870,000	790,000	790,000	400,000	400,000	
9	Bengkulu	1,300,000	900,000	800,000	720,000	720,000	560,000	560,000	
10	Bangka Belitung	3,335,000	1,350,000	930,000	850,000	850,000	400,000	400,000	
11	Banten	3,810,000	1,430,000	880,000	800,000	800,000	640,000	640,000	
12	Jawa Barat	3,700,000	1,760,000	880,000	800,000	800,000	560,000	560,000	
13	D.K.I. Jakarta	6,720,000	1,690,000	950,000	870,000	870,000	610,000	610,000	
14	Jawa Tengah	4,150,000	1,480,000	930,000	850,000	850,000	450,000	450,000	
15	Yogyakarta	4,700,000	1,350,000	890,000	810,000	810,000	630,000	630,000	
16	Jawa Timur	4,400,000	1,370,000	930,000	850,000	850,000	450,000	450,000	
17	Bali	4,890,000	1,810,000	1,070,000	990,000	990,000	910,000	910,000	
18	Nusa Tenggara Barat	3,500,000	1,760,000	880,000	800,000	800,000	580,000	580,000	
19	Nusa Tenggara Timur	3,000,000	1,050,000	830,000	750,000	750,000	550,000	550,000	
20	Kalimantan Barat	2,400,000	1,230,000	980,000	900,000	900,000	430,000	430,000	
21	Kalimantan Tengah	3,000,000	1,560,000	830,000	750,000	750,000	560,000	560,000	
22	Kalimantan Selatan	4,250,000	1,680,000	900,000	820,000	820,000	540,000	540,000	
23	Kalimantan Timur	4,000,000	1,750,000	1,030,000	950,000	950,000	550,000	550,000	
24	Kalimantan Utara	4,000,000	1,750,000	700,000	620,000	620,000	400,000	400,000	
25	Sulawesi Utara	3,200,000	1,560,000	770,000	690,000	690,000	550,000	550,000	

26	Gorontalo	1,320,000	1,200,000	1,150,000	630,000	550,000	550,000	400,000	400,000
27	Sulawesi Barat	1,260,000	1,100,000	1,030,000	940,000	860,000	860,000	400,000	400,000
28	Sulawesi Selatan	4,820,000	3,820,000	1,550,000	890,000	810,000	810,000	580,000	580,000
29	Sulawesi Tengah	2,030,000	1,500,000	1,300,000	980,000	900,000	900,000	520,000	520,000
30	Sulawesi Tenggara	1,850,000	1,300,000	1,100,000	680,000	600,000	600,000	450,000	450,000
31	Maluku	3,000,000	2,000,000	1,030,000	820,000	740,000	740,000	580,000	580,000
32	Maluku Utara	3,110,000	2,110,000	1,520,000	680,000	600,000	600,000	480,000	480,000
33	Papua	2,850,000	1,850,000	1,670,000	840,000	760,000	760,000	460,000	460,000
34	Papua Barat	2,750,000	1,750,000	1,490,000	840,000	760,000	760,000	500,000	500,000

#### 4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM DAERAH

NO	Provinsi	Gubernur/ Wakil Gubernur	PNS/ASN						
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C				
			Eselon I/ Pimpinan DPRD/Angg ota DPRD	Esselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon Golongan IV	Non Eselon Golongan III	Non Eselon Golongan II/I
1	Dumai	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
2	Rokan Hulu	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
3	Indragiri Hulu	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
4	Indragiri Hilir	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
5	Kampar	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
6	Bengkalis	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
7	Siak	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
8	Pelalawan	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
9	Kuantan Singingi	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
10	Kepulaun Meranti	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000
11	Rokan Hilir	800,000	700,000	650,000	550,000	450,000	400,000	350,000	350,000

**5. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

No	Uraian	Uang Representasi		
		Satuan	Luar Daerah	Dalam Daerah
1	Gubernur/Wakil Gubernur	OH	250,000	150,000
2	Eselon I/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	OH	200,000	100,000
3	Eselon II	OH	150,000	50,000

**6. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DALAM KOTA PADA SKPD BADAN PENGHUBUNG PEMRINTAH PROVINSI RIAU**

No	Uraian	SATUAN	TARIF
1	Eselon II	OH	450,000
2	Eselon III, Eselon IV, Non Eselon dan PTT	OH	400,000

**7. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP)**

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Tarif dari Pekanbaru
1	Dumai	OK	270,000
2	Rokan Hulu	OK	270,000
3	Indragiri Hulu	OK	270,000
4	Indragiri Hilir	OK	370,000
5	Kampar	OK	170,000
6	Bengkalis	OK	370,000
7	Siak	OK	200,000
8	Pelalawan	OK	170,000
9	Kuantan Singingi	OK	220,000
10	Kepulaun Meranti	OK	500,000
11	Rokan Hilir	OK	330,000
12	Pekanbaru	OK	150,000

**8. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)**

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif	
			Bisnis	Ekonomi
1	Ambon	OK	18,868,000	10,097,000
2	Balikpapan	OK	10,996,000	5,423,000
3	Banda Aceh	OK	13,102,000	7,508,000
4	Bandar Lampung	OK	6,482,000	3,433,000
5	Bandung	OK	6,525,000	3,701,000
6	Banjarmasin	OK	9,049,000	4,696,000
7	Batam	OK	4,000,000	2,500,000
8	Bengkulu	OK	9,947,000	5,637,000
9	Biak	OK	16,985,000	8,781,000
10	Denpasar	OK	9,092,000	4,942,000
11	Gorontalo	OK	12,814,000	7,840,000
12	Jakarta	OK	5,583,000	3,016,000
13	Jambi	OK	9,648,000	5,476,000
14	Jayapura	OK	17,435,000	9,380,000
15	Jogjakarta	OK	8,022,000	4,054,000
16	Kendari	OK	11,220,000	5,776,000
17	Kupang	OK	14,996,000	8,097,000
18	Makassar	OK	13,027,000	6,845,000
19	Malang	OK	8,461,000	4,439,000
20	Mamuju	OK	12,878,000	7,883,000
21	Manado	OK	14,055,000	6,599,000
22	Manokwari	OK	21,809,000	13,840,000
23	Mataram	OK	9,102,000	4,909,000
24	Medan	OK	4,000,000	2,500,000
25	Palangkaraya	OK	8,803,000	4,696,000
26	Palembang	OK	9,444,000	5,284,000
27	Palu	OK	14,931,000	8,129,000
28	Pangkal Pinang	OK	7,391,000	3,936,000
29	Pontianak	OK	8,247,000	4,514,000
30	Semarang	OK	7,797,000	3,979,000
31	Solo	OK	7,797,000	4,118,000
32	Surabaya	OK	9,241,000	4,407,000
33	Ternate	OK	15,584,000	9,680,000
34	Timika	OK	16,771,000	8,739,000

**5. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

No	Uraian	Uang Representasi		
		Satuan	Luar Daerah	Dalam Daerah
1	Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD	OH	250,000	150,000
2	Eselon I/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	OH	200,000	100,000
3	Eselon II	OH	150,000	50,000

**6. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DALAM KOTA PADA SKPD BADAN PENGHUBUNG PEMRINTAH PROVINSI RIAU**

No	Uraian	SATUAN	TARIF
2	Eselon II	OH	450,000
3	Eselon III/ESSELON IV, NON ESSELON DAN PTT	OH	400,000

**7. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP)**

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Tarif dari Pekanbaru	Maksimal Hari
1	Dumai	OK	270,000	3 hari
2	Rokan Hulu	OK	270,000	3 hari
3	Indragiri Hulu	OK	270,000	3 hari
4	Indragiri Hilir	OK	370,000	3 hari
5	Kampar	OK	170,000	2 hari
6	Bengkalis	OK	370,000	3 hari
7	Siak	OK	200,000	2 hari
8	Pelalawan	OK	170,000	2 hari
9	Kuantan Singingi	OK	220,000	3 hari
10	Kepulaun Meranti	OK	500,000	3 hari
11	Rokan Hilir	OK	330,000	3 hari
12	Pekanbaru	OK	150,000	3 hari

**8. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)**

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif	
			Bisnis	Ekonomi
1	Ambon	OK	18,868,000	10,097,000
2	Balikpapan	OK	10,996,000	5,423,000
3	Banda Aceh	OK	13,102,000	7,508,000
4	Bandar Lampung	OK	6,482,000	3,433,000
5	Bandung	OK	6,525,000	3,701,000
6	Banjarmasin	OK	9,049,000	4,696,000
7	Batam	OK	4,000,000	2,500,000
8	Bengkulu	OK	9,947,000	5,637,000
9	Biak	OK	16,985,000	8,781,000
10	Denpasar	OK	9,092,000	4,942,000
11	Gorontalo	OK	12,814,000	7,840,000
12	Jakarta	OK	5,583,000	3,016,000
13	Jambi	OK	9,648,000	5,476,000
14	Jayapura	OK	17,435,000	9,380,000
15	Jogjakarta	OK	8,022,000	4,054,000
16	Kendari	OK	11,220,000	5,776,000
17	Kupang	OK	14,996,000	8,097,000
18	Makassar	OK	13,027,000	6,845,000
19	Malang	OK	8,461,000	4,439,000
20	Mamuju	OK	12,878,000	7,883,000
21	Manado	OK	14,055,000	6,599,000
22	Manokwari	OK	21,809,000	13,840,000
23	Mataram	OK	9,102,000	4,909,000
24	Medan	OK	4,000,000	2,500,000
25	Palangkaraya	OK	8,803,000	4,696,000
26	Palembang	OK	9,444,000	5,284,000
27	Palu	OK	14,931,000	8,129,000
28	Pangkal Pinang	OK	7,391,000	3,936,000
29	Pontianak	OK	8,247,000	4,514,000
30	Semarang	OK	7,797,000	3,979,000
31	Solo	OK	7,797,000	4,118,000
32	Surabaya	OK	9,241,000	4,407,000
33	Ternate	OK	15,584,000	9,680,000
34	Timika	OK	16,771,000	8,739,000

**9 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

No	Provinsi tujuan	Satuan	Tarif Sekali Jalan
1	Aceh	OK	120,000
2	Sumatera Utara	OK	232,000
3	Riau	OK	75,000
4	Kepulauan Riau	OK	120,000
5	Jambi	OK	120,000
6	Sumatera Barat	OK	190,000
7	Sumatera Selatan	OK	125,000
8	Lampung	OK	145,000
9	Bengkulu	OK	95,000
10	Bangka Belitung	OK	90,000
11	Banten	OK	306,000
12	Jawa Barat	OK	140,000
13	D.K.I. Jakarta	OK	170,000
14	Jawa Tengah	OK	75,000
15	Yogyakarta	OK	94,000
16	Jawa Timur	OK	148,000
17	Bali	OK	150,000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	213,000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	80,000
20	Kalimantan Barat	OK	107,000
21	Kalimantan Tengah	OK	90,000
22	Kalimantan Selatan	OK	100,000
23	Kalimantan Timur	OK	100,000
24	Kalimantan Utara	OK	100,000
25	Sulawesi Utara	OK	110,000
26	Gorontalo	OK	200,000
27	Sulawesi Barat	OK	217,000
28	Sulawesi Selatan	OK	145,000
29	Sulawesi Tengah	OK	75,000
30	Sulawesi Tenggara	OK	131,000
31	Maluku	OK	210,000
32	Maluku Utara	OK	174,000
33	Papua	OK	355,000
34	Papua Barat	OK	145,000

Pit. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN